

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrullah, M. Arief, 2003, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, CV Bayu Media, Malang.
- ....., 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Andi Hamzah, 2006, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana. Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- ....., 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, 2005, *Mengenal Perlindungan Saksi Di Jerman*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ....., 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Chtzis, Ilias dan Tim UNDOC, 2011, *Praktek terbaik perlindungan saksi Dalam proses pidana yang melibatkan Kejahatan terorganisir*, LPSK-UNDOC, Jakarta.
- Danil, H. Elwi, 2012, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Peradilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17-18, sebagaimana dikutip dari Dani Krisnawati dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2006, *Berawal dari Melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witnes Security di Amerika Serikat*, Kata pengantar dalam buku WITSEC, *Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS*, Pete Earley dan Gerald Shur, ELSAM, Jakarta.
- ....., 2006, *Saksi, sosok yang terlupakan dari Sistem Peradilan Pidana, beberapa catatan kritis terhadap Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta.
- ....., 2008, *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No. 13 Tahun 2006*, Koalisi Perlindungan Saksi dan korban, Jakarta.
- Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- ....., 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional(edisi revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ....., 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ....., 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi(edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta.

- Kaligis, O.C., 2011, *Kejahatan Jabatan dalam Sistem Peradilan Terpadu*, Alumni, Bandung.
- Kartanegara, Satochid, Tanpa Tahun Terbit, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Kota Terbit.
- Lamintang, P.A.F., 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, ARMICO, Bandung.
- ....., 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamar, Holten, 1991, *The Criminal Courts: Structures, Personnel, and Processes*, McGraw-Hill, Inc., New York.
- Langbein, John H., 1979, *Understanding The Short History Of Plea Bargaining*, Faculty Scholarship, Yale Law School.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Manan, Bagir, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- ....., 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, UII Press, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penangaan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ....., 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhadar, dkk, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dilengkapi dengan 4 Undang-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-asas Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ....., 2009, *Hukum Progressif: Sebuah Sketsa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan.*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satuan Tugas Pemberantasan Hukum, 2011, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (justice Collabolators) Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi, Korban*, Satgas Mafia Hukum, Jakarta.
- Semendawai, Abdul Haris, dkk, 2011, *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto, 2012, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 1984, *Saksi dan Bukti: Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHP*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugandi, R., 2001, *KUHP Dan Penjelesannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Univresitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supranomo, Gatot, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 146. Togat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tierney, Kevin, 1971, *How to be a witness*, Oceana Publication, New York.

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijaya, Firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.

### **Jurnal**

Hiariej, Eddy O.S. (2), 2010, "Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban", *Newslette Komisi Hukum Nasional*, Vol.10 No. 6.

Manalu, River Yohanes, 2015, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Maulana, Aby, 2014, "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut Ruu KuhaP Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara", *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Volume 1 No. 1 Oktober 2014.

Mulyadi, Lilik, 2006, "Pergeseran Perspektif Praktek Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan", *Majalah Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun ke XXI No. 246, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2014, "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014.

Eddyono, Supriyadi Widodo, 2011, "Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, Perbandingannya di Amerika dan Eropa", *Jurnal Saksi dan Perlindungan Korban*, Volume 1 No 1 Tahun 2011.

Yuhermansyah, Edi, 2012, “Urgensi Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, *legitimasi*. vol.1 No. 2 Januari-Juni 2012.

### **Karya Ilmiah**

Artantojati, Sigit, 2012, “Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dianti, Flora, 2004, “Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Peradilan Pidana”, *Tesis*, Magister Hukum Universitas Indonesia.

Ekayanti, Rika, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Hapsari, Maria Yudithia Bayu, 2012, “Konsep dan Ketentuan Mengenai *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mulyadi, Aditya Wisnu, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nixon, 2013, “Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Turmodhi, Imam, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Doadji)”, *Tesis*, Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### **Makalah**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006, “Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)”, *laporan*, dibuat oleh Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006 yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006.



- Crijns, J.H., 2011, "Witness Agreements in Dutch Criminal Law", *paper*, International Seminar and Focus Group Discussionn The Protection of Whistleblowers as *Justice Collaborators*, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta.
- Murtadho, M. Ali, "Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Amerika Serikat, Jerman Dan Belanda", *Paper*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Sarwoko, Djoko, 2011, "Reward bagi Whistleblower (Pelapor Tindak Pidana) dan *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu", *Makalah*, disampaikan dalam Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.
- Semendawai, Abdul Haris, 2011, "Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia", *makalah*, International Workshop on The Protection of Whistleblower as *Justice Collaborator*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta.
- Suryananta, I Gst Agung Kadek, *Kebijakan formulasi peringanan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi di indonesia*, *paper*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya,.
- Turone, Giuliano, 2006, "Legal Frameworks and Investigative Tools for Combating Organized Transnational Crime in the Italian Experience", *makalah*, disampaikan pada The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) 134th International Training Course.
- Yunus, Yutira, 2013, "Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Collaborator: Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Paper*, Konfrensi kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
- Zuccarelli, Fausto, 2011, "Vice Chief Prosecutor Prosecutor's Office attached to the Court of Naples, Italy, Handling and Protecting Witnesses and Collaborators of Justice in Italy", *makalah*, International Seminar and Focus Group Discussionn The Protection of Whistleblowers as *Justice Collaborators*, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta.

## Internet

Hadi, Ilman, “Defenisi Saksi Mahkota”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>, diakses pada tanggal 29 September 2016.

Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2016”,  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ed897bf2789a7ad52cb9c2d420792402>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2015”,  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7ab834ad8c92d5d70997be17048c4baa>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2016”,  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d9a3ac50fecb3a3907225cb42aff7845>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2016”,  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2a05f4919a2fdbcb082b775468d780ce>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2016”,  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7a1489929d2cda4ec0eab7dcce13eb8c>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2015”,  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/996540e3ea0246f6acf0e236ee727f98>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

Wibisono, B. Kunto, “KPK ajukan banding terhadap putusan Abdul Khoir”,  
<http://www.antaranews.com/berita/567201/kpk-ajukan-banding-terhadap-putusan-abdul-khoir>, diakses pada tanggal 29 September 2016.

## Hasil Wawancara

Hapsoro Restu Widodo, Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, *wawancara*, wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017.

Muhammad Arif Setiawan, Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *wawancara*, wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2017.

M. Harun Sunardi, Jaksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, *wawancara*, wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017.

Nurwigati, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, *wawancara*, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017.



### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu).

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI No. M.HH-11.MH.03.02.th.2011; No. PER-045/A/JA/12/2011; No. 1 Tahun 2011; No. KEPB-02/01-55/12/2011; No. 4 Tahun 2011.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes (UNTOC).

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti, prihal tindak pidana korupsi, 14 Maret 2016.

Putusan Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST jo 06/PID/TPK/2016/PT.DKI atas nama terdakwa Tripeni Irianto Putro, prihal tindak pidana korupsi, 15 Maret 2016.

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt.Pst jo 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI atas nama terdakwa Abdul Khoir, prihal tindak pidana korupsi, 2 September 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, prihal pengujian Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, 25 juli 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, prihal pengujian Pasal 1 Angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a KUHAP, 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, prihal pengujian Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, 25 juli 2016.